

PERAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DI INDONESIA

Kuswan Hadji¹, Aulia Salsabila², Farantika Dwi Hardini³, Azahra Wulandari Aji⁴,
Aditya Amarta Putra⁵, Mohamad Dimas⁶

kuswanhadji@untidar.ac.id¹, aulliasalsaa@gmail.com², farantikahardini@gmail.com³,
azahrawulandariaji@students.untidar.ac.id⁴, adityaamartap@gmail.com⁵,
jayadimas437@gmail.com⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kepercayaan publik terhadap lembaga negara, peran masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan partisipasi melalui publik melalui mekanisme hukum yang ada, serta mengetahui bagaimana sinergi pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat luas dalam mewujudkan dan menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan partisipasi publik. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan guna menganalisis dan memperoleh data hubungan antara transparansi pemerintah dan tingkat kepercayaan publik pada lembaga-lembaga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepercayaan publik terhadap lembaga negara dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu transparansi dan partisipasi publik. Riset survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga negara sangat signifikan dan terkait dengan level transparansi dan partisipasi yang diterapkan. Dalam hal ini, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan memanfaatkan berbagai mekanisme hukum yang tersedia, masyarakat sipil dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata Kunci : Kepercayaan Publik, Transparansi, Partisipasi, Lembaga Negara

Abstract: *This research aims to measure the extent of public trust in state institutions, the role of civil society in encouraging transparency and participation through the public through existing legal mechanisms, and find out how the synergy of the government, state institutions, and the wider community in realising and creating an environment that supports transparency and public participation. The research method uses a normative juridical approach and literature study to analyse and obtain data on the relationship between government transparency and the level of public trust in state institutions. The results showed that public trust in state institutions is influenced by two main factors, namely transparency and public participation. Survey research conducted by Indikator shows that the level of public trust in various state institutions is very significant and is related to the level of transparency and participation implemented. In this regard, civil society has a very important role in realising good and democratic governance. By utilising the various legal mechanisms available, civil society can encourage the creation of transparent, accountable and participatory governance.*

Keywords: *Public Trust, Transparency, Participation, State Institution*

PENDAHULUAN

Transparansi dan partisipasi publik merupakan dua pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) karena keduanya berperan dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan legitimasi kebijakan. Di Indonesia, tantangan utama dalam penerapan transparansi dan partisipasi publik terletak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, yang dipicu oleh minimnya akses terhadap informasi publik dan terbatasnya keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi tidak hanya berarti penyediaan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu mengenai kebijakan serta proses pembuatannya, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Hal ini memungkinkan publik untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik terhadap kebijakan, sehingga membantu mencegah terjadinya praktik korupsi, kecurangan, dan manipulasi kekuasaan. Di sisi lain, partisipasi publik mengacu pada pelibatan aktif warga dalam berbagai tahapan pengambilan keputusan, baik melalui konsultasi langsung, musyawarah, maupun melalui perwakilan yang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan legitimasi keputusan yang diambil. Ketika transparansi dan partisipasi publik diterapkan secara efektif, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara akan semakin meningkat karena kebijakan yang dihasilkan mencerminkan rasa keadilan, keterbukaan, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, keterbukaan informasi dan keterlibatan publik bukan hanya menjadi indikator tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga instrumen penting untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik secara berkelanjutan.

Hukum memiliki peranan penting dalam mendorong partisipasi publik melalui berbagai mekanisme yang memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyediakan landasan hukum bagi masyarakat untuk berperan tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengawas dan evaluator dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi publik dalam konteks ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara transparansi pemerintah dan Tingkat kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena artikel ini akan berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta doktrin doktrin hukum, juga literatur literatur yang terkait dengan transparansi dan Tingkat kepercayaan public terhadap lembaga-lembaga negara.

Artikel ini menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data. Data yang digunakan adalah data sekunder, didalam artikel ini data yang dimaksud adalah dalam bentuk doktrin doktrin hukum atau pendapat para ahli, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah serta Undang-Undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara Dipengaruhi oleh Tingkat Transparansi dan Partisipasi Publik yang Diterapkan

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara sangat dipengaruhi oleh tingkat transparansi dan partisipasi publik yang diterapkan. Transparansi yang tinggi memberikan akses informasi yang jujur dan kontrol sosial efektif, sedangkan partisipasi publik aktif

meningkatkan kualitas kebijakan dan mengurangi risiko korupsi. Keduanya bersama-sama membentuk hubungan yang kokoh antara pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya dan implementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Transparansi dalam pemerintahan berarti kemampuan pemerintah untuk memberikan akses terbuka dan jujur terhadap informasi publik yang relevan.

Kepercayaan publik terhadap lembaga negara dipengaruhi oleh dua faktor utama: transparansi dan partisipasi publik. Riset survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga negara sangat signifikan dan terkait dengan level transparansi dan partisipasi yang diterapkan. Adapun hasil survei Indikator pada tahun 2024 menunjukkan bahwa TNI mendapatkan 89,3% kepercayaan publik, Presiden 86,7%, Kejaksaan Agung 76,2%, dan Polri 75,3%. Berikut adalah analisis lebih lanjut menunjukkan distribusi responden:

- a. TNI
Sangat percaya 19%, cukup percaya 70%, kurang percaya 8%, tidak percaya sama sekali 0%, tidak tahu/tidak jawab 2%.
- b. Presiden
Sangat percaya 20%, cukup percaya 66%, kurang percaya 9%, tidak percaya sama sekali 1%, tidak tahu/tidak jawab 3%.
- c. Kejaksaan Agung
Sangat percaya 10%, cukup percaya 66%, kurang percaya 18%, tidak percaya sama sekali 2%, tidak tahu/tidak jawab 4%.
- d. Polri
Sangat percaya 12%, cukup percaya 63%, kurang percaya 21%, tidak percaya sama sekali 2%, tidak tahu/tidak jawab 2%.

Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik. Ketika lembaga-lembaga negara beroperasi secara transparan dan inklusif, masyarakat cenderung memercayainya lebih tinggi. Informasi ini mencakup proses pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran, kebijakan publik, dan implementasi program-program pemerintah.

Transparansi dan partisipasi publik merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung hubungan ini:

- a. Meningkatkan Akuntabilitas
Transparansi dalam pemerintahan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- b. Memfasilitasi Partisipasi Aktif
Dengan memberikan akses informasi yang jelas dan terbuka, pemerintah memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi seperti diskusi, konsultasi, pemungutan suara, atau keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan karena pemerintah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- c. Membangun Kepercayaan Publik
Transparansi membuat masyarakat yakin bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil didasarkan pada kepentingan publik. Hal ini membangun kepercayaan kokoh sehingga pemerintah dapat lebih efektif menjalankan fungsi-fungsinya dan implementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Transparansi dan Partisipasi Publik Melalui Mekanisme Hukum yang Ada

Masyarakat sipil, yang mencakup berbagai kelompok organisasi nirlaba, aktivis, dan warga negara, memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan pemerintahan yang baik dan demokratis. Salah satu cara efektif untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memanfaatkan berbagai mekanisme hukum yang tersedia. Melalui pemanfaatan hukum, masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas aktif terhadap tindakan pemerintah dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Salah satu cara paling umum yang dilakukan masyarakat sipil adalah dengan mengakses informasi publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan hukum bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi dari badan publik. Masyarakat sipil dapat memanfaatkan undang-undang ini untuk meminta data dan dokumen terkait kebijakan publik, anggaran, proyek pembangunan, dan berbagai hal lainnya. Informasi yang diperoleh kemudian dapat dipublikasikan atau digunakan sebagai dasar untuk melakukan advokasi dan pengawasan. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan memberikan masukan dan pendapat, masyarakat sipil dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kepentingan publik. Masyarakat sipil dapat terlibat dalam berbagai forum konsultasi publik atau diskusi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Ketika menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum atau kebijakan yang merugikan publik, masyarakat sipil memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum. Gugatan perdata atau pidana dapat diajukan ke pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Melalui jalur hukum, masyarakat sipil dapat mendorong penegakan hukum dan keadilan. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat melakukan advokasi untuk mendorong perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih pro-partisipasi dan transparansi. Advokasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, lobi kepada anggota parlemen, atau bekerja sama dengan media massa.

Peran masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik melalui mekanisme hukum memiliki dampak yang sangat signifikan, antara lain :

a. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah

Dengan adanya pengawasan dari masyarakat sipil, pemerintah akan lebih terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

b. Mencegah korupsi

Transparansi dan partisipasi publik dapat membantu mencegah terjadinya korupsi karena setiap tindakan pemerintah dapat diawasi oleh masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas kebijakan publik

Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Memperkuat demokrasi

Partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokrasi. Namun, perlu diingat bahwa peran masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan partisipasi publik tidak selalu mudah. Masyarakat sipil seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan dari pihak berwenang, dan kurangnya dukungan dari masyarakat luas. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil untuk terus memperkuat kapasitas dan membangun jaringan kerjasama yang solid .

Kesimpulannya, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis. Dengan memanfaatkan berbagai

mekanisme hukum yang tersedia, masyarakat sipil dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Sinergi antara Pemerintah, Lembaga Negara, dan Masyarakat guna Mewujudkan dan Menciptakan Lingkungan yang Mendukung Transparansi dan Partisipasi Publik

Upaya pencarian sistem pemerintahan ideal yang mampu menciptakan stabilitas negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah menjadi tantangan abadi bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Sejarah mencatat bahwa berbagai negara telah bereksperimen dengan berbagai bentuk pemerintahan, namun hingga kini belum ditemukan satu formula tunggal yang dapat dianggap sempurna. Perkembangan zaman yang begitu pesat, ditandai dengan kemajuan teknologi yang revolusioner, telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap tata kelola pemerintahan. Di satu sisi, teknologi telah memungkinkan pemerintah untuk mengelola negara secara lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sistem pemerintahan berbasis digital, misalnya, telah mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru yang kompleks bagi para pemimpin negara. Perubahan pola kebutuhan masyarakat yang begitu cepat dan tidak terduga sering kali membuat pemerintah kesulitan untuk menyesuaikan diri. Globalisasi yang semakin intensif juga telah meningkatkan interkoneksi antar negara, sehingga masalah-masalah global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik bersenjata dapat berdampak langsung pada stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Tidak ada satu pun negara di dunia yang dapat sepenuhnya terlepas dari tantangan dalam mengelola negara. Setiap negara memiliki karakteristik yang unik, baik dari segi sejarah, budaya, maupun kondisi geografis. Oleh karena itu, solusi yang berhasil diterapkan di satu negara belum tentu dapat diterapkan di negara lain. Dalam konteks ini, penting bagi setiap negara untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemerintahannya, dengan selalu memperhatikan konteks lokal dan dinamika global yang terus berubah. Singkatnya, pencarian sistem pemerintahan yang ideal merupakan sebuah proses yang terus berlangsung dan tidak pernah selesai. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, diperlukan kepemimpinan yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Setelah reformasi, Indonesia berupaya keras memperbaiki sistem pemerintahannya. Lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang seharusnya bekerja sama dan saling mengawasi (*check and balances*) terus mengalami perubahan. Tujuannya adalah agar negara mampu menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks.

Selain lembaga negara utama, Indonesia juga membentuk lembaga-lembaga non-struktural. Harapannya, dengan adanya lembaga-lembaga tambahan ini, seluruh komponen pemerintahan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945 . Dengan kata lain, pasca reformasi, Indonesia terus berbenah diri untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik. Perubahan-perubahan yang dilakukan mencakup baik lembaga negara utama maupun lembaga-lembaga tambahan. Semua upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hak atas informasi adalah bagian yang sangat menentukan dalam kehidupan setiap manusia terutama sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam semua proses-proses sosial. Hal tersebut membuat setiap orang harus memperoleh haknya untuk mendapat akses informasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karena itu keterbukaan informasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan di sebuah negara harus mengandung tiga unsur utama yaitu transparansi, efisiensi, dan partisipasi (Sumarto,

2003). Keterbukaan informasi adalah kunci utama untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Ketika setiap warga negara memiliki akses yang mudah terhadap informasi, mereka akan lebih mampu berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan meningkatkan kualitas pemerintahan dan memperkuat rasa memiliki terhadap negara .

Dalam negara demokrasi, hak untuk mengetahui adalah hak asasi yang paling mendasar . Pemerintah yang demokratis wajib menjamin agar seluruh warga negaranya memiliki akses yang sama terhadap informasi. Keterbukaan informasi bukan hanya sekadar hak, tetapi juga merupakan kewajiban negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih. Singkatnya, hak untuk tahu adalah hak dasar setiap warga negara Indonesia. Dengan terpenuhinya hak ini, maka kita telah selangkah lebih dekat menuju Indonesia yang lebih demokratis, beradab, dan kuat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting bagi keberhasilan lembaga publik, termasuk pemerintah. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, lembaga publik dapat meningkatkan kinerja mereka, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan lebih akuntabel kepada masyarakat. Keterbukaan informasi akan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan (Yang & Maxwell, 2011). Kunci utama untuk mewujudkan keterbukaan informasi adalah dukungan kuat dari lembaga legislatif. Mereka harus membuat undang-undang dan peraturan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan semua lembaga pemerintahan menerapkan prinsip keterbukaan informasi. Dengan adanya payung hukum yang kuat, hubungan antar lembaga pemerintah akan menjadi lebih baik, mengurangi risiko konflik, dan meningkatkan saling percaya. Hal ini memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk lebih terbuka dan saling berbagi informasi (Criado dkk., 2013; Gil-Garcia & Martinez-Moyano, 2007; Otjacques, 2007; Perri dkk., 2008).

Sinergi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Masing-masing pihak memiliki peran yang krusial dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan rakyat .

Pertama, pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi harus menjadi pelopor dalam mendorong transparansi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuka akses publik terhadap informasi negara, baik melalui website resmi maupun melalui saluran komunikasi lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan melibatkan masyarakat sejak dini, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, lembaga negara lainnya, seperti lembaga legislatif dan yudikatif, juga memiliki peran penting dalam mendukung transparansi dan partisipasi publik. Lembaga legislatif dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, lembaga yudikatif memiliki peran untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Ketiga, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki hak dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses pembangunan negara. Masyarakat dapat berperan aktif dengan cara mengawasi kinerja pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Untuk mewujudkan sinergi yang efektif, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Membangun komunikasi yang terbuka dan dua arah
Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat perlu membangun saluran komunikasi yang efektif untuk saling bertukar informasi dan pendapat.
- b. Meningkatkan kapasitas masyarakat
Masyarakat perlu diberikan akses terhadap informasi dan pengetahuan yang memadai agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Memperkuat kelembagaan
Lembaga-lembaga negara perlu diperkuat kapasitasnya dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang baik, termasuk dalam hal transparansi dan akuntabilitas.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat
Pemerintah perlu menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui forum konsultasi publik, musyawarah desa, atau e-partisipasi.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Transparansi dan partisipasi publik akan menjadi norma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih percaya dan terlibat dalam pembangunan negara.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa lembaga-lembaga seperti TNI dan Presiden memperoleh tingkat kepercayaan yang tinggi, yang mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Dengan adanya akses informasi yang baik, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bernegara, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemerintahan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap pihak memiliki peran penting dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Keterbukaan informasi bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban negara untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Saran

Perlunya penguatan mekanisme transparansi dan partisipasi publik dalam setiap aspek pemerintahan. Pertama, pemerintah harus secara aktif membuka akses informasi kepada masyarakat melalui platform digital dan saluran komunikasi lainnya, sehingga warga negara dapat dengan mudah mengakses data dan dokumen yang relevan. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, misalnya melalui forum konsultasi publik dan musyawarah desa, agar suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan. Kedua, lembaga legislatif perlu memperkuat regulasi yang mendukung keterbukaan informasi dan partisipasi publik, dengan membuat undang-undang yang jelas dan komprehensif. Ketiga, peningkatan kapasitas masyarakat juga harus menjadi fokus, dengan memberikan pendidikan dan pelatihan mengenai hak-hak mereka dalam mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F (2023). The Role of the Constitutional Court in Strengthening Indonesian Democracy: A Perspective on the Sovereignty of Law and the Distribution of Power. *SIGN Jurnal Hukum*, jurnal.penerbitsign.com.
- Arintasari, OW, & ROHMAN, A (2015). PENGARUH DIVERSIFIKASI INDUSTRI, GEOGRAFIS, DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada, eprints.undip.ac.id.
- Hak, Universitas Islam Indonesia. Pusat Studi, & ... (2007). Mengurai kompleksitas hak asasi manusia: kajian multi perspektif., Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- Hidayat, R (2022). TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID 19. *Jurnal Neo Societal*; Vol, pdfs.semanticscholar.org
- Maulinda, D, Alifia, TD, Ramadhan, SR, & ... (2024). Minimnya Pemeberian Ruang Partisipan serta Transparansi oleh DPR Kepada Rakyat dalam Pembuatan Undang-Undang. *Jurnal Hukum dan ...*, journal.widyakarya.ac.id
- Muhaimin, H, Ichwan, W, Basith, RA, & ... (2023). Etika pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat. *Journal Law and ...*, journal.ummat.ac.id.
- Raharjo, S, Anindita, A, & Karim, A (2023). TINJAUAN KOMPREHENSIF HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS SISTEM HUKUM TATA NEGARA. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian ...*, jrkhm.org.
- Ricky, R, & Rahimallah, MTA (2022). Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*
- Sofwan, S (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *JATISWARA*, jatiswara.unram.ac.id
- Sulistiowati, R (2014). Implementasi desentralisasi dan otonomi daerah pada Daerah Otonomi Baru (DOB)(Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung). ... - *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, repository.lppm.unila.ac.id.
- Wiranda, FA, Prihatini, AE, & ... (2015). Pengaruh Sistem Informasi Manajemen Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya Dan Tangerang Bidang *Jurnal Ilmu Administrasi ...*, ejournal3.undip.ac.id.